

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan. Laporan keuangan memberi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Untuk itu laporan keuangan harus menyajikan data-data informasi yang berguna bagi perusahaan. Agar informasi dapat dipahami secara sama oleh setiap pembacanya, maka diperlukan standar akuntansi. Manfaat dari standar akuntansi diharapkan perusahaan mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri, sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya sebagai alat kontrol keuangan (dari segi biaya), alat standar untuk menentukan laba pada periode berikutnya, dan mendapatkan dana (misalnya dari bank) untuk pengembangan usaha.

Berdasarkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, setiap perusahaan telah diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas. SAK ETAP dimaksudkan untuk digunakan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. Salah satu standar akuntansi adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP maka Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak

memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal (SAK ETAP, 2015). Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Mei 2015. SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 (Fithakurrahmah, 2013).

Seiring dengan penerbitan SAK ETAP, standar akuntansi Indonesia yakni SAK Umum juga mengalami berbagai penyesuaian terkait dengan pengadopsian standar akuntansi berbasis internasional IFRS (kongres XI- IAI, Desember 2010). Penyesuaian tersebut termasuk pemberlakuan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 50 mengenai instrumen keuangan: penyajian dan pengungkapan (PSAK 50) dan PSAK 55 instrumen keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 55). Pemberlakuan PSAK 50 dan PSAK 55 tersebut sekaligus menggantikan PSAK 31, sehingga standar akuntansi bagi perusahaan pun harus mengacu pada PSAK yang berlaku (Fithakurrahmah, 2013).

Penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (PSAK ETAP) oleh dewan standar akuntansi keuangan ikatan akuntan Indonesia (DSAK IAI) ini adalah sebagai alternatif standar akuntansi keuangan (SAK) yang boleh diterapkan oleh koperasi dan usaha kecil menengah (UMKM) di Indonesia, perubahan-perubahan pada SAK ETAP sebagai bentuk SAK yang lebih sederhana dibandingkan dengan

SAK Umum yang lebih rumit sehingga diharapkan dapat lebih mudah untuk dipahami. Perusahaan sebagai salah satu entitas pengguna SAK ETAP diharapkan memiliki pengetahuan tentang kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan. Pada prakteknya SAK ETAP masih menggunakan istilah Neraca, Laporan Laba rugi, Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan Keuangan (Rudiantoro dan Siregar, 2012).

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil refleksi dari sekian banyak transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak-pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan (Djarwanto, 2011). Laporan keuangan oleh PT. Kota Jati Furindo yang tersusun dengan baik, mudah dimengerti, disajikan dengan wajar, relevan ini sangat membantu dalam meningkatkan perkembangan usaha khususnya dalam memperoleh bantuan dana dari pihak perbankan. Usaha manajemen PT. Kota Jati Furindo dalam memahami konsep standar yang baru sangat berdampak terhadap kualitas dari laporan keuangan yang telah disusun.

Adanya SAK ETAP diharapkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu melakukan pembukuan akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan sehingga lebih mudah bagi para pengusaha UMKM untuk memperoleh pembiayaan (Rudiantoro dan Siregar, 2012). Pelaksanaan pembukuan akuntansi di PT. Kota Jati Furindo yang masih

menjalankan usaha tanpa melakukan laporan secara go public masih tetap harus melakukan laporan akuntansi sesuai SAK ETAP.

Hasil penelitian Ghazi (2018) UMKM hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan menggunakan kas kecil dan belum menerapkan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Kendala yang dihadapi yaitu, pemilik tidak faham akan pentingnya laporan keuangan untuk usaha yang mereka jalani, dan kurangnya sumber daya manusia dalam bidang akuntansi, sehingga kurangnya pencatatan - pencatatan keuangan dalam UMKM. Selain itu, penyimpanan bukti pembelian maupun pengeluaran tidak tersimpan secara baik, sehingga pada saat melakukan pencatatan ada kekeliruan pada UMKM.

Sementara penelitian Nurlela & Heny (2016) menyatakan dengan adanya SAK ETAP pemilik Toko mampu membuat pencatatan keuangan hingga penyusunan laporan keuangan dengan lebih mudah, akurat, dan lebih teratur. Walaupun hasilnya belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP karena keterbatasan tersedianya bukti transaksi yang disimpan oleh pemilik usaha. Pada usaha Toko belum memiliki laporan keuangan yang sesuai. Toko hanya melakukan pencatatan biaya - biaya yang dikeluarkan setiap transaksi dengan menggunakan buku kas kecil. Pencatatan pembukuan yang dilakukan belum lengkap, dan tidak pernah sama sekali mencatat nilai persediaan barang yang ada pada UKM tersebut. Dengan

adanya SAK ETAP perusahaan akan lebih mudah untuk menyusun laporan keuangan.

Penelitian Lilya dkk (2015) menyatakan sistem pencatatan keuangan yang dilakukan secara manual dan masih sangat sederhana, alasan membuat pencatatan keuangan adalah untuk mempermudah pemilik dalam memberikan bonus kepada karyawannya, Faktor yang menyebabkan gagalnya SAK ETAP pada Peggy Salon karena adanya faktor internal berupa kurangnya pemahaman, kedisiplinan dan sumber daya manusia, sedangkan faktor eksternalnya karena kurangnya pengawasan dari stakeholder yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Untuk terciptanya sektor UMKM dengan pengelolaan keuangan yang baik, *professional* dan berdaya saing, maka diperlukan unsur “keharusan” dalam implementasi pencatatan dan pelaporan selain itu diperlukan adanya dukungan dan perhatian dalam bentuk pengawasan (*controlling*) dan pendampingan terhadap implementasi pencatatan akuntansi berbasis SAK ETAP pada UMKM dalam hal ini tentunya pengawasan dari *stakeholder*.

Hasil penelitian Mega dkk (2013) menyatakan dengan adanya SAK ETAP diharapkan untuk menciptakan keseragaman dalam melaksanakan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sehingga dapat mengakibatkan informasi yang tepat terhadap kebutuhan pengguna. Dengan adanya SAK ETAP diharapkan untuk menciptakan keseragaman dalam melaksanakan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan

sehingga dapat mengakibatkan informasi yang tepat terhadap kebutuhan pengguna.

Penelitian Floren dkk (2013) menyatakan perusahaan telah diterapkan laporan keuangan sesuai dengan SAK dari ETAP tetapi belum sepenuhnya, masih banyak elemen yang belum sesuai SAK dari ETAP, yaitu penghasilan yang tidak terpisahkan sesuai antara laba operasi dan pendapatan di luar usaha yang diperoleh. Semua pembelian pasokan dikelompokkan dalam akun beban di laporan neraca, harus menyediakan ketika hanya yang telah digunakan diambil sebagai beban yaitu sebesar 70% dari nilai pasokan. kendala alam oleh perusahaan dalam menerapkan SAK ETAP antara lain, adanya kesalahan yang dilakukan oleh perhitungan perusahaan. Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara daerah karena pemilik pada saat yang sama menjadi penyelenggara [usaha. Pemilik juga memiliki usaha lain untuk dikembangkan sehingga tidak terlalu fokus pada satu bidang usaha.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Implementasi Sak Etap Dalam Penyajian Laporan Keuangan PT. Kota Jati Furindo Di Kabupaten Jepara”

## **1.2. Batasan Penelitian**

Untuk menghindari agar pembahasan tidak sampai keluar dari pokok permasalahan yang ada, maka perlu pembatasan masalah yang difokuskan pada praktek akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan

mengacu pada SAK ETAP di PT. Kota Jati Furindo, maka batasan masalah yang akan disajikan adalah:

1. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif.
2. Data yang digunakan adalah data periode tahun 2016-2017
3. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel laporan keuangan yang direkap dari PT. Kota Jati Furindo.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana penerapan akuntansi di dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP yang dilakukan PT. Kota Jati Furindo?

### **1.4. Tujuan penelitian**

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia tentunya mempunyai tujuan tertentu. Hal ini akan turut menentukan bagaimana cara dan upaya kita guna mencapai tujuan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akuntansi di dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP yang dilakukan PT. Kota Jati Furindo.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini mengarah pada dua aspek berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi

yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

- b. Sebagai bahan masukan untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir mengenai penerapan akuntansi di dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP.
  - c. Sebagai bahan masukan bagi yang memerlukannya untuk diperbandingkan dengan teori-teori yang ada.
2. Manfaat Praktis
- a. Pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran, dan ilmu pengetahuan kepada pihak lain yang berkepentingan.
  - b. Sebagai bahan masukan pimpinan PT. Kota Jati Furindo dalam mengambil keputusan atau kebijaksanaan di hari-hari mendatang guna mengadakan perbaikan yang dianggap perlu untuk kemajuan PT. Kota Jati Furindo.

